

EDISI : Kamis, 11 April 2019

# KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :  
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL  
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *Nusa Bali*

Kategori : *PAD*

# Sewa Aset Mulai Diberlakukan

★ Lahan Eks SGO Rp 46.000-50.000 Per Meter Persegi

Pemkab Buleleng akan mendapat Rp 55,2 juta per tahun dari lahan di Jalan Sahadewa dan Rp 20 juta pertahun di Jalan Lorong Melati.

SINGARAJA, NusaBali  
Badan Keuangan Daerah

(BKD) Kabupaten Buleleng, mulai memberlakukan pengenaan sewa atas pemanfaatan aset-aset daerah. Pihak yang telah memanfaatkan aset, kini diminta segera mengajukan permohonan ke Bupati Buleleng.

Salah satu aset yang mulai dikenakan sewa adalah aset berupa lahan di Jalan Sahadewa Singaraja, dan lahan eks Sekolah Guru Olahraga (SGO) yang ada di Jalan Lorong Melati Singaraja. Kedua aset tersebut masing-masing di Jalan Sahadewa seluas 1.250 meter persegi

telah ditempati oleh empat orang untuk usaha, sedangkan lahan di Sahadewa seluas 400 meter persegi ditempati enam orang sebagai tempat tinggal.

Pemanfaatan kedua aset tersebut dikenakan sewa dengan tarif berbeda. Aset di Lorong Melati ditetapkan tarif sewanya sebesar Rp 50.000 per meter persegi pertahun. Sedangkan aset di Jalan Sahadewa, sebesar Rp 46.000 per meter persegi pertahun. Pengenaan sewa tersebut sudah disosialisasikan kepada para penghuni yang memanfaatkan aset

tersebut. Dalam sosialisasi itu, pihak penghuni dipersilakan mengajukan permohonan sewa kepada Bupati Buleleng.

Kepala Bidang (Kabid) Aset BKD Buleleng, Made Pasda Gunawan dikonfirmasi Rabu (10/4) mengatakan pengenaan sewa tersebut berdasar, Perda Nomor 6 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dimana salah satu poin menyebut, setiap objek barang milik daerah yang tidak dipergunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintah dapat dikerjasamakan dengan

pihak ketiga dengan pola pemanfaatan.

Disebutkan pula, pengenaan nilai tarif sewa aset tersebut sesuai hasil penilaian dari tim appraisal. Penilaian tersebut berdasar beberapa indikator diantaranya lokasi strategis lahan. Dengan tarif sewa tersebut, Pemkab Buleleng akan mendapat pemasukan sebesar Rp 55,2 juta per tahun dari lahan di Jalan Sahadewa dan sebesar Rp 20 juta pertahun di Jalan Lorong Melati.

"Setelah kami mengumpulkan data-data juridis terkait

aset itu dan memang pengelolaan selama ini belum optimal, sehingga sejalan dengan kebijakan pimpinan kami lakukan penilaian nilai sewa yang layak dan sudah ditetapkan yang tidak bisa ditawar," katanya.

Menurut birokrat asal Desa Kayuputih, Kecamatan Banjar ini, jika calon penyewa setuju dengan tarif yang ditetapkan tersebut, BKD akan membuat surat perjanjian pemanfaatan sewa aset. Jangka waktu penyewaan akan disesuaikan dengan kesepakatan pihak penyewa dan pemilik aset.

"Bagi yang sudah menempati sekarang atau calon penyewa lain bisa mengajukan permohonan dan menyetujui tarif sewa itu. Kerjasama ini akan diikat dengan surat perjanjian keduabelah pihak," tegasnya.

Dulunya aset yang akan disewakan tersebut adalah rumah eks guru SGO. Lokasinya masing-masing 7 unit berada di Jalan Sahadewa Singaraja, dan 3 unit di Jalan Lorong Melati, Singaraja. Rumah tersebut ditempati oleh 10 penghuni, dimana salah satunya dipakai tempat usaha. **K19**

Media :

Nusa Bali

Kategori :

Politik

# Bawaslu Warning Parpol Bongkar Sendiri APK

★ Di Buleleng Satpol PP Berangus APK Melanggar



PERSONEL Satpol PP tengah menurunkan APK yang melanggar zona pemasangan di Buleleng.

• NUSABALI/SUDIRTA

wanti partai politik maupun para caleg untuk menurunkan sendiri Alat Peraga Kampanye (APK) sebelum masa tenang. Bila hingga tanggal 13 April 2019 atau empat hari sebelum hari pencoblosan, APK belum diturunkan, maka Bawaslu akan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran paksa.

“Mereka wajib menurunkan APK miliknya sendiri. Kami akan mengirimkan surat ke masing-masing parpol,” tegas Ketua Bawaslu Badung, I Ketut Alit Astasoma, Rabu (10/4).

Nah, bila sampai hari tenang pada 14-16 April 2019, Bawaslu masih men-

MANGUPURA, NusaBali  
Semakin dekatnya pemi-

lu 2019, Bawaslu Kabupaten Badung mewanti-

emukan APK bertengger, maka Bawaslu akan langsung mengambil tindakan tegas. Bawaslu pun sudah melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung terkait penertiban. Guna memperlancar proses penertiban, pihaknya juga akan menggandeng pihak kepolisian.

Selain terkait APK, Alit Astasoma turut mengajak parpol, peserta pemilu, simpatisan, dan seluruh benar-benar mematuhi masa tenang. Jangan sampai, kata dia, masih ada aktivitas berbau kampanye. “Kami harapkan masa tenang betul-betul efektif dan kondusif, jadi mari kita manfaatkan

sebaik-baiknya,” ajaknya.

Pihaknya mengharapkan masyarakat melapor ke Bawaslu, bila selama masa tenang didapati ada kegiatan yang berbau kampanye. “Silahkan dilaporkan. Itu bisa diproses,” katanya.

Terpisah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng kembali menurunkan paksa alat peraga kampanye (APK) yang tersebar di sejumlah titik di wilayah Buleleng. Selain melanggar zona pemasangan, tidak sedikit APK terpasang dalam kondisi rusak.

Kasat Pol PP Buleleng, Putu Dana, Rabu kemarin mengatakan, penertiban atas APK tersebut berdasar

rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Buleleng. APK yang ditertibkan direkomendasikan karena melanggar zona pemasangan atribut kampanye, sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam proses penertiban itu, Pol PP juga menemukan beberapa atribut lain yang melanggar aturan pemasangan. “Ada yang dipasang di fasum. Misalnya banner atau spanduk yang dipasang di tiang listrik atau tiang telepon. Malah ada juga yang memaku atributnya di pohon perindang. Karena tidak sesuai aturan, kami amankan alat peraganya ke kantor,” katanya. **asa, k19**

a Media : *NUSA BALI*

Kategori : *PARIWISATA*



• NUSABALI/LILIK

Pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan *goes to school* menysar siswa SMA/SMK di Buleleng, Selasa (9/4).

## Generasi Milenial Disusupi Ilmu Kepariwisataan

SINGARAJA, NusaBali

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kembali mengedukasi generasi milenial di Buleleng menyal pembanguan pariwisata. Setelah menysar mahasiswa, giliran 160 siswa SMA/SMK se-Buleleng mendapatkan pelatihan dan edukasi terkait kepariwisataan.

Kepala Dinas Periwisata Provinsi Bali, AA Yuniartha Putra, mengatakan pelatihan dasar yang menysar siswa SMA/SMK ini merupakan upaya Kementerian Pariwisata memberikan pemahaman sejak dini terkait kepariwisataan. Targetnya minimal mereka dapat mengetahui destinasi wisata yang ada di daerahnya dan dapat menceritakan sedikitnya tentang destinasi tersebut saat bertemu dan ditanya oleh wisatawan.

Dengan memberikan pemahaman lebih awal tentang kepariwisataan, Bali yang mendunia dengan pariwisata budaya dan alamnya, dapat dimanfaatkan oleh generasi milenial. "Jika mereka sudah pelajari dengan baik dan paham betul soal kepariwisataan, sehingga mereka tidak mesti pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, tetapi bisa mengelola destinasi

dan potensi wisata yang ada di daerahnya," jelas Yuniartha soal pelatihan yang dilaksanakan Selasa (9/4) lalu.

Pemahaman menyoal kepariwisataan ini pun kini sedang dirancang dapat masuk ke dalam kurikulum. Sehingga diharapkan generasi milenial di Bali yang hidup berdampingan dengan pariwisata ikut berkontribusi dalam pembanguan pariwisata, meski hanya memberikan informasi yang baik dan benar terkait destinasi wisata di wilayah mereka.

Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Buleleng, Nyoman Sutrisna mengapresiasi program pelatihan peningkatan SDM kepariwisataan *goes to school* itu. Ia pun mengharap kedeppannya, Buleleng mendapatkan jatah lebih soal peningkatan SDM kepariwisataan. Selain juga kegiatan di bidang industri pariwisata, destinasi wisata dan juga pemasaran.

"Kami berharap Buleleng mendapat program lebih banyak soal pengembangan sektor pariwisata, sehingga pembanguan sektor pariwisata di Buleleng lebih cepat terwujud," harap Sutrisna. **k23**

Nama Media : *NUSA BALI*

Kategori : *PERGURUAN TINGGI*

# Besok Rektor Jampel Dilantik

## ★ Segera Susun Tim Wakil Rektor Baru

SINGARAJA, NusaBali

Dr I Nyoman Jampel MPd, Calon Rektor Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja yang terpilih kembali periode 2019-2023, akan dilantik Jumat (12/4) mendatang. Jampel yang terpilih secara aklamasi pada pemilihan akhir calon rektor Undiksha, Selasa (2/4) lalu dikabarkan akan dilantik bersamaan dengan tujuh rektor baru dari Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia.

Sesuai dengan surat undangan dari Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Republik Indonesia, tanggal 10 April 2019, Jampel akan dilantik pada Jumat (12/4) pukul 14.00 WITA di ruang auditorium Gedung D lantai 2 Kemenristekdikti. Waktu pelantikan yang ditentukan dalam surat bernomor B/192/M/TU.01.00/2019 itu tepat sehari sebelum masa jabatan Rektor Jampel berakhir yakni tanggal 13 April 2019.

Rektor asal Kuta Selatan, saat dihubungi Rabu (10/4) malam, mengaku baru saja menerima surat undangan pelantikan dari kementerian. Ia pun mengaku bersyukur atas kepercayaan penuh yang diberikan kepada Undiksha untuk kedua kalinya. Ia yang saat dihubungi sedang berada di Jakarta, mengaku mendapat tantangan untuk memacu diri memacu diri memenuhi harapan seluruh sivitas akademika, menjadikan Undiksha sebagai kampus yang lebih baik.

"Jelas ini merupakan tantangan meskipun Undiksha merupakan Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) termuda, kita selalu berpikir untuk mensejajarkan dan menjadi trend setter bagi Perguruan Tinggi lain," kata Jampel. Setelah dilantik besok, Jampel pun bersiap akan membentuk tim pendamping wakil rektor barunya. Dari empat wakil rektor yang ada, hanya

seorang saja yang akan diajak kembali di periode kepemimpinannya di tahun 2019-2023.

Penyegaran di jabatan wakil rektor menurut Jampel akan dilaksanakan karena tiga dari empat Wakil Rektor tak memungkinkan dari faktor umur dan lama menjabat, sehingga perlu digantikan wajah-wajah baru. "Tiga Warek untuk periode 2019-2023 memang sudah tidak memenuhi syarat umur, yakni Warek I dan Warek IV. Kalau Warek III sudah dua kali menjabat. Yang masih bisa bertahan hanya Warek II (Prof Dr Wayan Lasmawan MPd, red), dari segi umur masih memenuhi syarat, kerjanya juga bagus," kata Dr Jampel.

Terkait dengan pemilihan calon pendamping wakil rektornya, Jampel mengaku akan meminta pertimbangan sejumlah pihak dan tim pengkaji di Undiksha untuk bersama memikirkan Warek yang tepat. Seperti halnya Warek I yang mengurus soal akademik, harus benar-benar menguasai akademik dan perkembangan pendidikan nasional. Selain juga dituntut menguasai IT dan bahasa asing, untuk menunjang program internasionalisasi.

Selanjutnya pemilihan Warek III yang berurusan dengan mahasiswa, ditantang untuk akademisi Undiksha yang mampu meningkatkan prestasi mahasiswa di kancah nasional. Ia pun mengaku mencari Warek III yang dapat mendorong mahasiswanya bisa menulis sebanyak-banyaknya dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIM) dan tentunya kedua Warek ini harus memiliki komitmen untuk bersama membawa Undiksha ke arah yang lebih baik. "Semua nanti yang terpilih yang terpenting memiliki komitmen untuk lembaga, jangan sampai ada kepentingan pribadi," tegas dia.

Sedangkan untuk jabatan Warek

IV, sejauh ini masih dalam tahap pengkajian. Karena selama ini jabatan Warek IV tidak ada dalam Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Undiksha. "Nanti apakah masih namanya Warek atau Bagian Kehumasan sedang kami godok, karena di OTK tidak ada Warek IV," jelas dia.

Sementara itu dalam empat tahun ke depan, akademisi asal Kuta Selatan, Kabupaten Badung ini tetap komitmen untuk membangun lembaga di segala lini. Dirinya telah mempersiapkan visi mewujudkan Undiksha yang unggul berlandaskan Tri Hita Karana melalui internasionalisasi dan *trend center university*. Hal tersebut sejalan dengan visi lembaga menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun 2045.

Mendukung hal tersebut, strategi telah dipersiapkan. Pada tahun 2019-2020, dicanangkan sebagai tahun *reputable international university*. Programnya, yakni mengembangkan kurikulum yang berbasis KKNI dengan pengakuan internasional, meningkatkan kualitas dan kuantitas riset internasional, publikasi internasional, dan konferensi internasional. Selain itu ada pula pengembangan infrastruktur yang terstandarisasi internasional, mereformasi tata kelola perguruan tinggi yang demokratis, humanis dan kolaboratif berbasis layanan *ubiquitous* dengan pemanfaatan teknologi informasi modern. Tak kalah penting juga dilakukan menguatkan dan meningkatkan SDM, baik pegawai maupun dosen yang memiliki pengakuan internasional.

Sementara itu, untuk tahun 2021-2023 dicanangkan sebagai tahun *trend center university*. Programnya, menjadikan Undiksha sebagai rujukan dan *role model* pembelajaran nasional. Selain itu ada pula pengembangan riset yang menjadi rujukan nasional dan internasional, mengembangkan hilirisasi hasil riset berbasis tujuan dunia industri dan *role model* rekayasa sosial, menjadikan Undiksha sebagai rujukan publikasi dengan indexasi individu dan lembaga yang tinggi. Penguatan SDM juga masih menjadi perhatian pada tahun ini. Ditargetkan juga bisa menjadi rujukan nasional. Di tengah persaingan yang semakin ketat, juga dikembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). "Saya juga ingin Undiksha bisa menjadi rujukan pembelajaran melalui program persekolahan, pendidikan dan pelatihan," jelasnya. @ k23



Dr I Nyoman Jampel MPd, calon rektor terpilih Undiksha periode 2019-2023.

• NUSABALILIK

## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media :

Nusa Bali

Kategori :

IMIGRASI

Soal Bule Belanda Bikin Resah

# Imigrasi Tak Akan Memediasi

SINGARAJA, NusaBali

Pasca pelaporan warga terhadap WNA Belanda yang meresahkan di Desa Petandakan, Buleleng, Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja langsung memeriksa Johannes Franciscus Peters, 60. "Kami masih dalam tahap penyelidikan, kemarin sudah kami cek juga dan berkomunikasi dengan terlapor dan penjaminnya seorang WNI, termasuk warga yang selama ini terlibat masalah dengan yang bersangkutan," kata Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja, Thomas Aries Munandar, Rabu (10/4).

Dari hasil pemeriksaan izin tinggal di Buleleng, terlapor Peters masuk dan tinggal di Buleleng dengan surat-surat yang lengkap dengan izin tinggal. "Kalau alasan dia kenapa sampai begitu belum dapat kami jelaskan karena masih dalam penyelidikan," imbuh dia.

Peters pun disarankan oleh pihak imigrasi tidak tinggal di rumah kontraknya di Desa Petandakan

sementara waktu, sampai situasi kembali kondusif. "Untuk mediasi mungkin tidak akan kami lakukan karena kemarin sudah sempat dilakukan pihak desa. Kami sudah menyarankan sementara untuk tidak tinggal di sana dulu, Tapi itu bukan keputusan final, hanya saran pribadi saja. Keputusan akhir nanti setelah penyelidikan selesai baru bisa ditentukan," jelas Thomas.

Sementara itu Perbekel Desa Petandakan, Wayan Joni Arianto dikonfirmasi terpisah sejauh ini mengaku masih menunggu langkah dari kepolisian dan juga pihak Imigrasi. Pihaknya sebagai pelapor, mengaku sangat hati-hati mengambil keputusan terkait permasalahan yang melibatkan WNA. "Kami masih menunggu tindak lanjut laporan kemarin kami ke Mapolsek Kota Singaraja, karena kami tidak ingin gegabah juga mengambil keputusan, jangan sampai citra Bali rusak karena satu oknum ini," jelasnya.

Hanya saja dari apa yang sudah

diperbuat oleh Peters selama dua tahun mengontrak di wilayah Desa Petandakan, ia dan warganya setuju Peters segera angkat kaki dari daerahnya. Joni juga tak memungkiri jika pihaknya juga masih menelusuri pemilik rumah yang dikontrak Peters dan penjaminnya Wayan Nita Marlina, 44, untuk melakukan pendekatan lebih lanjut.

Sementara itu sebelumnya diberitakan Perbekel dan warga Desa Petandakan ngelurug Polsek Kota Singaraja pada Senin (8/4) lalu. Mereka melaporkan perbuatan WNA asal Belanda, Johannes Franciscus Peters, 60. Terlapor yang tidak bekerja itu tercatat mengantongi Surat Keterangan Lapor Diri (SKDL) dan tinggal bersama penjaminnya di Petandakan selama dua tahun terakhir. Namun keberadaan Peters sering kali membuat tetangganya tak merasa nyaman. Bahkan Peters juga disebut-sebut mengancam warga yang berseteru dengannya dengan senjata tajam dan senjata api. **k23**



## KLIPING BERITA MEDIA CETAK KAB BULELENG

Nama Media : **NUSA BALI**

Kategori : **KEBUDAYAAN**

Antisipasi Tudingan Tidak Objektif

# Penerima Wija Kusuma Masih Digodok

SINGARAJA, NusaBali

Ada perubahan penentuan penghargaan Wija Kusuma bagi seniman yang dinilai berjasa mengharumkan nama Buleleng. Penentuan penerima dipastikan lebih selektif dengan pendekatan budaya dan ilmiah. Perubahan sistem penetapan penerima itu dilakukan pasca Dinas Kebudayaan mendapat banyak masukan dari masyarakat terkait penetapan penerima penghargaan Wija Kusuma, yang terkesan subjektif.

Kepala Bidang Kesenian, Dinas Kebudayaan Buleleng, Wayan Sujana, Rabu (10/4) kemarin menjelaskan saat ini Dinas Kebudayaan dengan Majelis Pertimbangan dan Pembinaan Kebudayaan (Listibiya) Kabupaten Buleleng masih menggodok persyaratan penetapan penerima penghargaan itu.

"Selama ini kami memang banyak menerima saran dan kritikan dari masyarakat, karena dalam penetapan penerima penghargaan menggunakan pendekatan budaya, rekomendasi dari panglinsir, sehingga disinyalir oleh be-



Wayan Sujana

berapa masyarakat ada subjektifitas, ini yang sedang kami perbaiki agar kedepannya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," ujar Sujana.

Dalam pendekatan ilmiah, calon yang diusulkan oleh panglinsir dan tokoh pengamat seni dan budaya, akan menjalani kajian kembali. Sejauh mana keterlibatannya dalam berkesenian, berapa lama dan karya apa saja yang dilahirkan, serta kelengkapan adminis-

trasi akan dinilai dengan bobot. Mereka yang mendapatkan bobot tertinggi, yang akan menerima penghargaan Wija Kusuma tersebut pada malam pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) tingkat Kabupaten.

Sementara itu untuk penghargaan Wija Kusuma yang diberikan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai wujud kepedulian kepada seniman masih dijatah lima orang. Meskipun saat ini perkembangan kesenian tak hanya bisa dipandang dari seni tradisional saja. Karena saat ini banyak kesenian modern seperti kaligrafi, fotografi, sastra, penggerak seni yang juga pantas diapresiasi atas karya dan kegiatan berkesenian yang mereka lakukan selama ini. "Hal ini juga nanti akan kami godok bersama Listibiya. Targetnya ada perangkat lunak yang akan digunakan untuk menentukan siapa yang pantas. Selain juga perkembangan seni yang saat ini cukup banyak tak hanya seni tradisional saja, tetapi juga seni modern," tegas Sujana. **k23**

• NUSABALI/LILIK

Nama Media : *Musa Bali*

Kategori : *Danau*



BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana, saat mengecek pengurugan tanah di Danau Buyan, Desa Pancasari.

## Material Galian *Shortcut* Dibawa ke Danau Buyan

SINGARAJA, NusaBali

Tanah galian dari proyek pembangunan shortcut Singaraja-Denpasar, titik 5 dan 6 di wilayah Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, kini ada yang dibawa ke Danau Buyan, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada. Tanah galian itu dipakai mengurug lahan-lahan yang ada di pinggir Danau Buyan di Dusun Buyan. Dikhawatirkan tanah urugan itu masuk ke dalam Danau. Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana pun sudah mengecek pengurugan lahan-lahan di pinggir Danau Buyan tersebut.

Informasinya, pengiriman tanah galian dari proyek shortcut ke lokasi Danau Buyan, telah dilakukan sejak empat hari lalu. Konon pengiriman tanah galian itu atas permintaan pemilik lahan. Salah satu lahan yang diurug dari tanah galian proyek Shortcut adalah tanah Duwen Pura (DP) Ulun Danau Buyan, Desa Pakraman Pancasari.

Pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) wilayah VIII, belum bisa dikonfirmasi terkait dengan

pengiriman tanah galian dari proyek Shortcut titik 5 dan 6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN wilayah VIII, Ketut Payun belum mengkonfirmasi soal ini.

Namun Bendesa Pakraman Pancasari, Anak Agung Ngurah Dharma Wirata dikonfirmasi Rabu (10/4) mengakui, pengurugan tanah DP Ulun Danu dari tanah galian proyek shortcut atas permintaan dari krama Pancasari.

Dijelaskan, sesuai sertifikat tanah DP Ulun Danau Buyan tercatat seluas 28 are. Dari luas itu, ada sekitar 10 are yang akan diurug. Pengurugan itu lantaran lahan itu selalu tergenang air akibat air Danau Buyan naik. Sehingga lahan yang selama ini difungsikan sebagai areal parkir ketika ada Upacara di Pura Ulun Danau Buyan dan Melasti, tidak bisa dipakai. "Kebetulan karena ada tanah galian gratis, kami urug itu agar bisa difungsikan. Dan kebetulan juga ke depannya agar ada penataan di kawasan Danau Buyan," terangnya.

Disinggung, kekhawatiran tanah

urugan itu jatuh ke dalam Danau? Bendesa Ngurah Dharma Wirata menegaskan, lokasi tanah yang diurug berada di luar tanggul danau. Sehingga tanah urugan itu tidak akan jatuh ke dalam danau. "Karena lokasinya berada di luar tanggul, jadi tidak sampai jatuh ke dalam danau. Itu sudah kami perhitungkan," jelasnya.

Sementara, Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana menyambut positif upaya prajuru Desa Pakraman Pancasari upaya pengurugan tanah DP Ulun Danu Buyan tersebut. Hanya saja, Bupati memita agar pengurugan itu dibarengi dengan pemadatan agar tanah urug itu tidak hayut ke dalam danau termasuk penyederan di pinggir danau. "Ya, saya sudah lihat langsung, tanah yang diurug itu tanah milik Desa Pakraman Pancasari, tidak ada tanah milik warga perseorangan. Ini bagus agar tanah itu tidak selalu digenangi air. Tetapi perlu juga dibarengi dengan penyederan dan pemadatan, agar tanah tidak hayut ke dalam danau ketika turun hujan," terangnya. **k19**